



**STRATEGI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DALAM PENAGGULANGAN
KABUT ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Min, 11 Agt 2019 09:13:43



LANGKAH STRATEGIS YANG SUDAH DILAKUKAN :

1. PENCEGAHAN

- a. RAKOR
- b. SOSIALISASI
- c. APEL SIAGA
- d. HIMBAUAN MELALUI MEDIA TV, RADIO DAN KORAN
- e. PEMANTAUAN DAN GROUND CHECK HOTSPOT
- f. PATROLI TERPADU

2. PENANGGULANGAN

- a. PEMADAMAN DARAT
- b. PEMADAMAN UDARA (WATER BOMBING)
- c. PEMBUATAN SEKAT KANAL
- d. SUMUR BOR

3. PASCA KEBAKARAN

- a. PENEGAKAN HUKUM
- b. KONSOLIDASI/PENGUATAN PENCEGAHAN, KOORDINASI SAMPAI TINGKAT DESA

1. UPAYA PENCEGAHAN

- A. MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI YANG DIHADIRI OLEH KEPALA BNPB, KEPALA BRG-RI, FORKOPIMDA DAN BUPATI/WALIKOTA SE-PROVINSI JAMBI, BERTEMPAT DI AUDITORIUM RUMAH DINAS GUBERNUR JAMBI, TANGGAL 16 MARET 2019



Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



- B. GUBERNUR JAMBI MENGHADIRI RAKOR EVALUASI DAN ANTISIPASI DALKARHUTLA SEMESTER I TAHUN 2019, DI HOTEL PANGERAN PEKAN BARU-RIAU, TANGGAL 18 JULI 2019

C. GUBERNUR JAMBI MENTEAPKAN STATUS SIAGA DRURAT MELALUI SK GUBERNUR JAMBI NOMOR 841/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI TANGGAL 23 JULI 2019 TMT 23 JULI 2019 S/D 23 OKTOBER 2019



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 841 / KEP.GUB/BPBD-2.2/2019

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- Indonesia merupakan negara kepulauan yang letakannya strategis dan lahan di Provinsi Jambi sejak Desember 11 Tahun 2019 di 8 Kabupaten* baru dalam Provinsi Jambi dengan ditandai meningkatnya jumlah tempat, berpotensi menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- Indonesia merupakan negara kepulauan yang letakannya strategis dan lahan di Provinsi Jambi sejak Desember 11 Tahun 2019 di 8 Kabupaten* baru dalam Provinsi Jambi dengan ditandai meningkatnya jumlah tempat, berpotensi menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- Indonesia merupakan negara kepulauan yang letakannya strategis dan lahan di Provinsi Jambi sejak Desember 11 Tahun 2019 di 8 Kabupaten* baru dalam Provinsi Jambi dengan ditandai meningkatnya jumlah tempat, berpotensi menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat;

Meningat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1967 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3646);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Sebelum dari pada Menimbang Menimbang dan Setelah Menimbang dan 1 Tahun Tiga Bulan Nomor : 841/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019 Tanggal 23 Juli 2019
- Keputusan Bupati tentang Hal Nomor : 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2018;
- Keputusan Bupati tentang Hal Nomor : 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2018;
- Keputusan Bupati tentang Hal Nomor : 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2018;
- Keputusan Bupati tentang Hal Nomor : 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

SEDAFU

SEKDA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

SEKTA

E. GUBERNUR JAMBI MENJADI INSPEKTUR UPACARA PADA APEL SIAGA KESIAPAN MENGHADAPI MUSIM KEMARAU TAHUN 2019, BERTEMPAT DI LAPANGAN MAKOREM JAMBI ,TANGGAL 8 AGUSTUS 2019

D. GUBERNUR JAMBI BERSAMA FORKOPIMDA PROVINSI JAMBI MENGIKUTI RAKOR PENAGANAN KARHUTLA YANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN RI, TANGGAL 6 AGUSTUS 2019, DI ISTANA MERDEKA JAKARTA



2. UPAYA PENANGGULANGAN

- a. MEPERHATIKAN KONDISI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MASIH TERJADI DI PROVINSI JAMBI, GUBERNUR JAMBI BERSAMA FORKOPIMDA, DPRD DAN SELURUH BUPATI/WALIKOTA MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI UNTUK SEGERA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS, DI RUMAH DINAS GUBERNUR JAMBI, 18 SEPTEMBER 2019



- b. GUBERNUR JAMBI, KAPOLDA, DANREM DAN KETUA DPRD PROVINSI JAMBI MENINJAU LANGSUNG KEBAKARAN HUTN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER BANTUAN BNPB.

- c. GUBERNUR JAMBI BERSAMA KEPALA OPD PEMROV DAN PEMKAB BESERTA UNSUR TNI/POLRI MENINJAU LANGSUNG SEKALIGUS MEMBERI ARAHAN KEPADA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA CATUR RAHAYU, KEC. DENDANG, KAB.TANJAB TIMUR, TANGGAL 23 SGUSTUS 2019



- d. GUBERNUR JAMBI BERSAMA BUPATI MUARO JAMBI DAN SATGAS KARHUTLA PROVINSI JAMBI LANGSUNG SEKALIGUS MEMBERI ARAHAN KEPADA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA BETUNG, KEC. KUMPEH, KAB. MUARO JAMBI, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019

- e. MELAKSANAKAN SHOLAT ISTISQA BERSAMA WARGA JAMBI.
AGAR DITURUNKAN HUJAN UNTUK MEMBANTU PEMADAMAN,
DI LAPANGAN GUBERNUR TANGGAL 23 AGUSTUS 2019



- f. MEMBERIKAN MASKER KEPADA WARGA JAMBI,
PASAR ANGSO DUO 18 SEPTEMBER 2019



Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

f. MENYALINGI WARGA KURANG MENINGGA DUNIA
ANGGOTA MANGGALA AGRI ALIM. ASMARI DI BAJUBANG
KAB. BATANGHARI



3. PASCA

PENEGAKAN HUKUM :

- **Data tersangka Gakkum tindak pidana Karhutla Polda Jambi dan jajaran periode Januari s.d September 2019 berjumlah 19 tersangka, dengan rincian sbb :**
- **1) Proses hukum yang ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Prov. Jambi melalui Koorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jambi, Pelaku Karhutla (Berkas perkara telah dinyatakan engkap (F21), Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi kemudian Kejati jambi melimpahkan ke Kejari Sarolangun).**
- **2) Polres Tanjab Barat, 2 orang tersangka**
- **3) Polres Batanghari, 2 org Tersangka**
- **4) Polres Tanjab Timur, 5 org tersangka**
- **5) Polres Tebo 3 org tersangka**
- **6) Polres Muara Jambi, 3 org Tersangka**
- **7) Polres Muaro Bungo, 3 org Terangka**

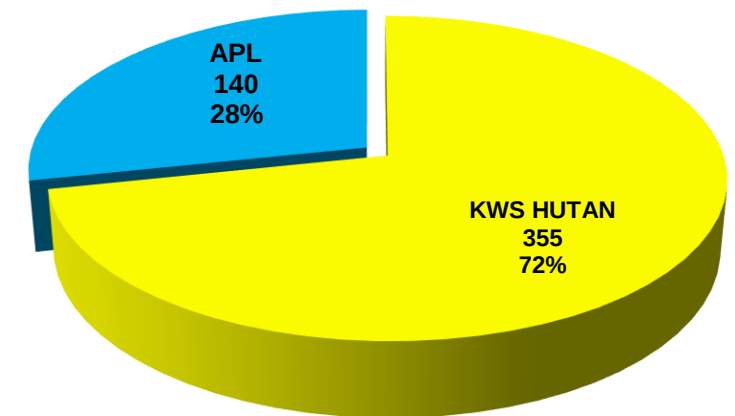
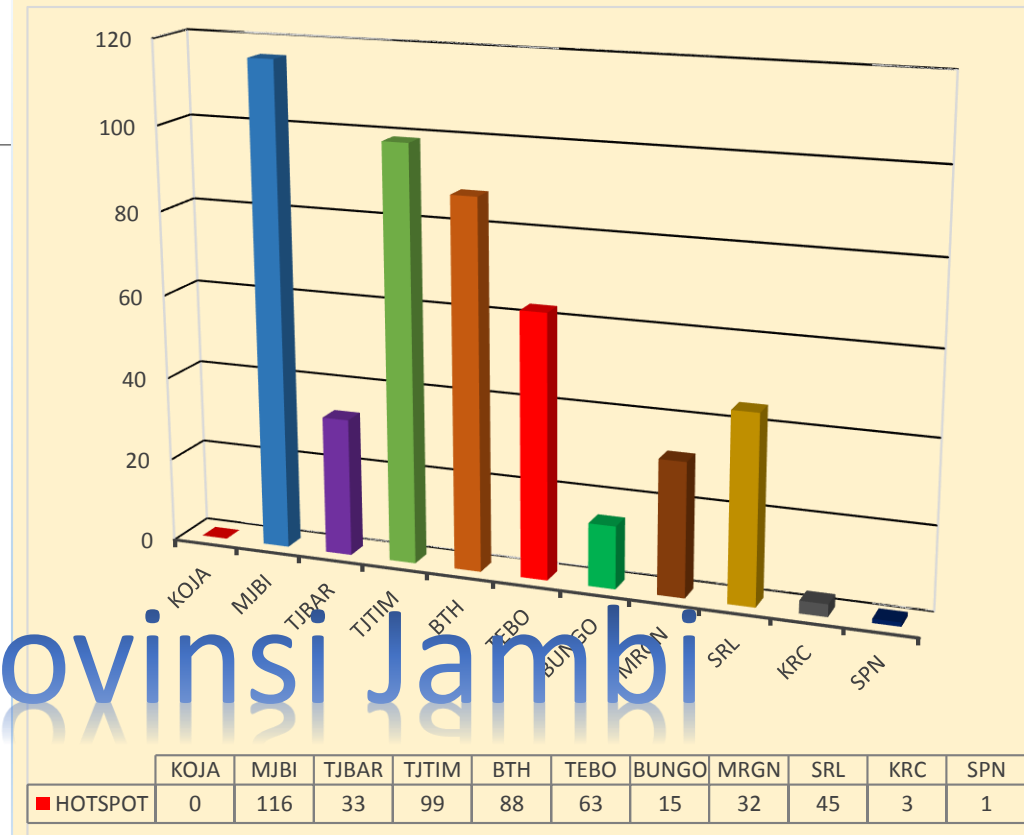
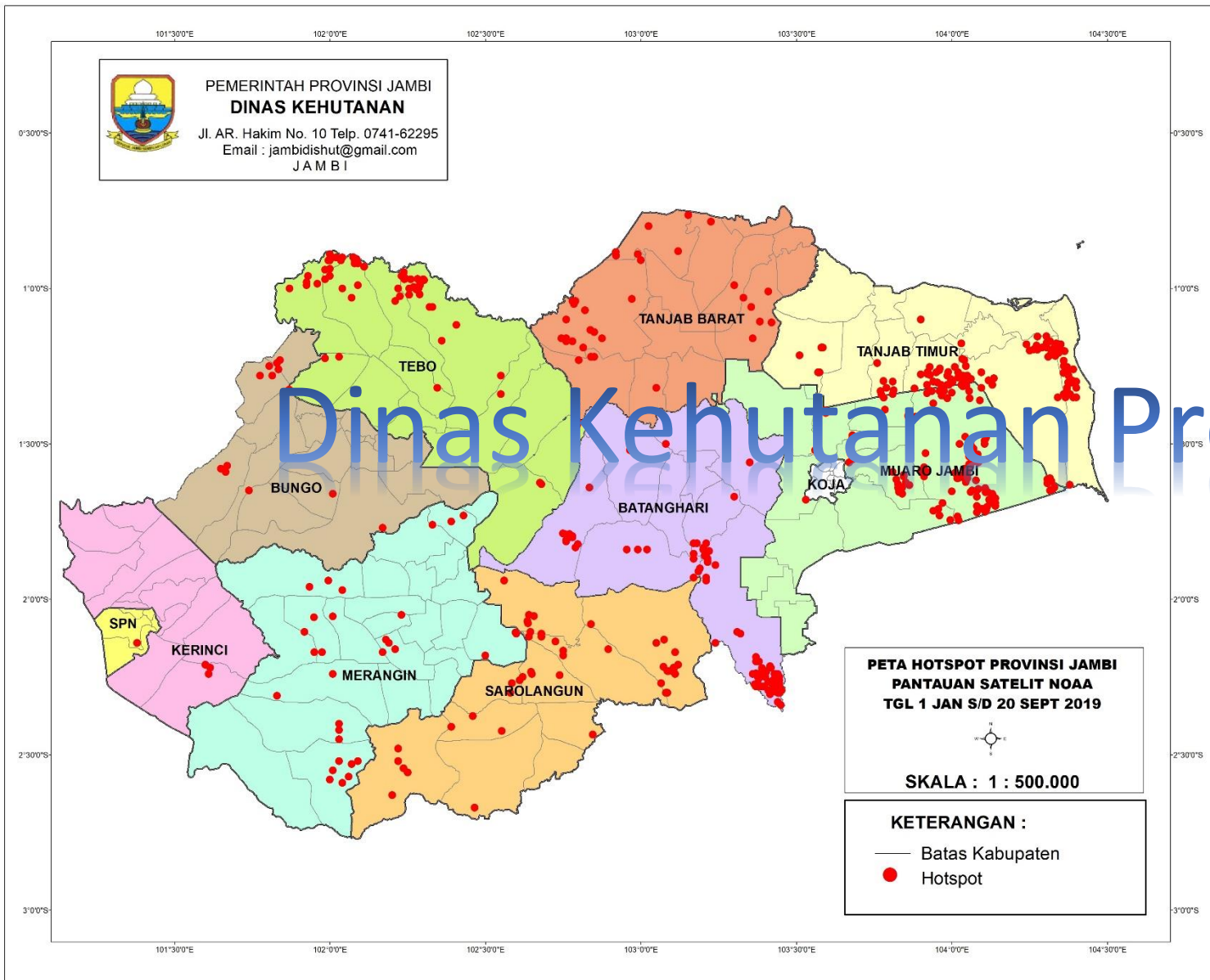
KONDISI KARHUTLA TAHUN 2019

- 1) Musim Kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya : El Nino lemah
- 2) Kebakaran di lahan gambut, butuh upaya ekstra dan akses yang sulit
- 3) Kesadaran masyarakat masih rendah
- 4) Penegakan Hukum terkendala alat bukti dan saksi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



PETA SEBARAN HOTSPOT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 BERDASARKAN PANTAUAN SATELIT NOAA Periode 1 Januari s/d 20 September 2019 (TOTAL : 495 HOTSPOT)



**SEBARAN HOTSPOT
BERDASARKAN FUNGSI**

KONDISI SAAT INI DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA 2019 :

- BANTUAN HELI WATER BOMBING SEBANYAK 3 UNIT, PATROLI 1 UNIT.
- PEMADAMAN GABUNGAN SATGAS KARHUTLA PROVINSI DAN KABUPATEN TERHADAP LOKASI KARHUTLA TERUTAMA DI AREAL GAMBUT DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI, KAB. TANJAB TIMUR DAN TANJAB BARAT.
- PENGUSULAN KE BPPT UNTUK MELAKUKAN MODIFIKASI CUACA (HUJAN BUATAN).

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



15 Sep 2019 12.53.44
-1°37'57,92995"S 104°1'12,62666"E
Altitude:22.0m
Speed:0.0km/h
Kasdim 0415/Batanghari

REKOMENDASI :

- Penegakan Hukum, baik terhadap perorangan maupun korporasi, Tujuan menimbulkan efek jera
- Alternatif-alternatif yang dapat diaplikasikan dalam Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
- Peningkatan peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian Karhutla melalui Dana Desa, mengingat karhutla yang terjadi banyak di lahan masyarakat dalam wilayah administratif Desa
- Pendekatan Sosiologis dan Agama terhadap masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
- DALAM SITUASI DARURAT SEPERTI SAAT INI, PERLU PENANGANAN STRATEGIS DAN CEPAT YANG MEMERLUKAN KEBIJAKAN UNTUK MENEROBOS ATURAN YANG TIDAK MEMBOLEHKAN MEMBUKA AKSES JALAN GUNA MOBILISASI ORANG DAN ALAT DI AREAL HUTAN LINDUNG GAMBUT LONDERANG

TERIMA KASIH

